

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dengan tema yang sama dan juga teori-teori serta hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan yang akan diuraikan secara singkat.

##### **2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan dasar dalam penyusunan penelitian dan bahan perbandingan. Tujuannya agar dapat mengetahui hasil penelitian yang sejenis oleh peneliti terdahulu untuk menjadi gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. Ada juga hasil penelitian terdahulu seperti:

1. Hasil penelitian Arie Fitriyani (2017). Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Dan Wilayah Dalam Penyediaan Lahan Permukiman Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tata ruang Kota Pasuruan yang proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan pertumbuhan penduduk mencapai 194.815 jiwa . Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif bersifat kualitatif.

2. Hasil penelitian Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani(2019). Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan”. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan yangberkelanjutan serta penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan yang diterapkan saat ini masih memerlukan perhatian, para peneliti ini lebih memfokuskan penelitiannya pada kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif bersifat kualitatif.
3. Hasil penelitian Diani Safitri (2018). Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan rencana tata ruang wilayah yang belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan pola ruang yang ada dikarenakan beberapa faktor pendukung yang tidak terealisasi dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif bersifat kualitatif.
4. Hasil penelitian Firdaus Juliansyah Ashari Sahar (2015). Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau”. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Bulukumba. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif.

5. Hasil penelitian Kurniawan Akbar (2015). Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasisituasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaanpertanyaan, tanggapan dari para infonforman dan studi kepustakaan berdasarkan indikator yang ditentukan dalam penelitian.

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1	Arie Fitriyani	Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Dan Wilayah Dalam Penyediaan Lahan Permukiman Masyarakat	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Dokumentasi dan Wawancara
2	Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani	Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Dokumentasi dan Wawancara
3	Diani Safitri	Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sinjai	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Observasi Wawancara dan Dokumen

1	2	3	4	5	6	7
4	Firdaus Juliansyah Ashari Sahar	Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Observasi Wawancara dan Dokumen
5	Kurniawan Akbar	Implementasi Kebijakan Penataan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Observasi Wawancara dan Dokumen

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2023)

## 2.1.2 Kajian Terhadap Administrasi Publik

### 2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Keberadaan administrasi selalu berkembang dengan pola pikir, yang kemudian menjadi pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas manusia. Hal ini dilakukan secara sadar agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan berbagai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah kegiatan yang mencakup catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, dan dokumen. Administrasi dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Proses pengembangan teori eksekutif selalu berlangsung mengikuti keinginan manusia baik sebagai ilmuwan administrasi maupun secara profesional administrasi.

Administrasi berlangsung dalam organisasi formal, suatu unit sosial yang dibentuk dengan tujuan mencakup unsur konflik dan perubahan. Organisasi dengan struktur formal, kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber daya, dan tujuan merupakan komponen fundamental dari pekerjaan administrator. Tugas administrator adalah melaksanakan tugas melalui proses pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian dalam Pasolong (2010:3) menyatakan “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”.

The Liang Gie dalam Mariati Rahman (2017) mendefinisikan “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Silalahi (2011:5) menyatakan bahwa “ Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistemis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta mempermudah memperoleh kembali secara keseluruhan dan didalam hubungannya satu sama lain”

Dari definisi tersebut, penulis mencoba menyimpulkan dan mendefinisikan manajemen sebagai suatu tugas terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan berdasarkan efisiensi dan rasionalitas yang efektif.

#### **2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi publik adalah aspek terpenting dari badan administratif diseluruh dunia. Baik itu negara demokrasi, negara sosialis, atau negara kapitalis, semua aspek kehidupan warganya, tidak terkecuali negara sosialis, dipengaruhi danditentukan oleh pemerintah. Ada perubahan besar dalam cara administrasi antara zaman kuno dan abad pertengahan. Saat itu, prakarsa tersebut hanya sebatas fungsi administratif yang bersifat sporadis, seperti menjaga ketertiban dan pendapatan masyarakat, dengan sedikit atau tanpa aktivitas sosial.

Secara sederhana, administrasi publik adalah bidang pengelolaan lembaga publik. Administrasi publik juga berbeda dengan administrasi bisnis, bersama dengan studi organisasi. Ketika manajemen menyelidiki lembaga swasta, maka administrasi publik menyelidiki lembaga publik seperti kantor dan otoritas, dari tingkat kabupaten hingga tingkat pusat. Kajian ini tentang birokrasi; penyusunan, pelaksanaan dan

evaluasi kebijakan publik. Administrasi pembangunan, pemerintahan negara, dan *good governance*.

Menurut Woodrow Wilson dalam Wirman Syafri, (2012;21) Definisi administrasi publik adalah : “Urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat”

Menurut Henry ( 2017) mendefinisikan :

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Menurut Gray dikutip Mariati Rahman (2017) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut :

- 1) Dapat menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan
- 2) Melindungi hak-hak atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- 3) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.



Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7) menjelaskan bahwa :

“Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”

Dari definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa konsep administrasi publik adalah kerjasama individu atau kelompok lembaga dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

### **2.1.3 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan atau policy menurut KBBI diartikan sebagai rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan latar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan juga cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dll) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip untuk mencapai suatu tujuan. Menurut crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) “kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisianya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah”.

Dari uraian diatas bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2017: 166), kebijakan adalah

“serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2011) menyatakan bahwa, “kebijakan merupakan program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu danditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

#### **2.1.3.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat luas dan mencakup segala hal mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, dan hiburan.

#### **2.1.3.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Adanya kebijakan publik merupakan alternatif pemerintah dalam memecahkan masalah masyarakat dan harus berpedoman pada kepentingan masyarakat. Menurut Dye dalam buku Indah, et. Al, (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

berikut: “Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*)”.

Berdasarkan uraian diatas adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah tergantung tujuan yang dilakukan itu seperti apa, apakah menyelesaikan masalah, dan yang lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut Dunn (2013:132) “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan Tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, suatu kebijakan publik apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Carl Chief J.O Udoji (1981) dalam buku Nuryanti, n.d, (2015) mengatakan ”Siapa yang berpartisipasi dan apa peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan bergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri”. Berdasarkan uraian diatas menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan

tidak hanya dipahami sebagian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### **2.1.3.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkandiikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidakmelakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Affrian (2012) kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah, ada lima ciri umum kebijakan publik yaitu:

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, anda tidak perlu membuat kebijakan
2. Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi dan penegakan hukum
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan
4. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena mereka memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhi.

Sedangkan menurut Hogwood & Gunn dalam Samudra,dkk (2023) berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari 11 definisi, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bidang aktivitas tertentu (sebagai tanda aktivitas bidang); Branding atau penamaan kebijakan akan menjadi sebuah kontinum dan menjadi program rutin yang terstruktur dan tertanam dalam kebijakan.
2. Kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan; Pernyataan pemerintah mengenai suatu keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat, baik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya maupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Kebijakan sebagai proposal khusus (sebagai proposal khusus); Usulan *bottom-up* atau *top-down* khusus yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan
4. masyarakat. Misalnya mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mengambil keputusan yang mengarah pada kebijakan dari pemerintah.
5. Kebijakan sebagai keputusan. Apapun langkah yang diambil pemerintah dalam membuat keputusan, itu adalah kebijakan publik.

Pada saat yang sama keputusan pemerintah adalah diam, jadi diam pemerintah adalah sebagai kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah.

6. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi resmi (sebagai otorisasi formal); Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal Kebijakan dalam bentuk peraturan serupa dengan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai sah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk menjalankan tugas, asas, dan fungsinya yang dilakukan melalui pengesahan formal. Kebijakan formal biasanya mengikat pemangku kepentingan kebijakan.
7. Kebijakan sebagai program. Program pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik formal maupun informal, merupakan suatu kebijakan.
8. Kebijakan sebagai produk (sebagai output); Kebijakan sebagai output adalah bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki output yang diharapkan. Output yang dihasilkan oleh program kerja menjadi bagian dari kebijakan publik. Misalnya, ketika peraturan pemerintah tentang penanganan sampah ditetapkan, keluaran peraturan yang dihasilkan menjadi keputusan pengelolaan sampah. Keputusan regulasi ini termasuk dalam kategori kebijakan publik.
9. Kebijakan sebagai hasil akhir (sebagai hasil); Begitu juga dengan hasil sebagai bagian dari kebijakan yang merupakan hasil akhir dari program kerja yang telah dilaksanakan. Hasil akhir dari program atau Tindakan pemerintah adalah bagian dari kebijakan.
10. Kebijakan sebagai teori atau model. Dalam pemerintahan, berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah menghasilkan keluaran atau outcome yang berbeda untuk dijadikan kebijakan pemerintah.
11. Kebijakan sebagai proses (as a process); Sebagai suatu proses, kebijakan akan memiliki keterkaitan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Setiap keputusan atau peraturan memiliki sifat hierarkis antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan dengan demikian merupakan suatu kerjasama kolektif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ciri-ciri kebijakan publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tampaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Dari ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah tindakan pemerintah yang saling berhubungan atau terstruktur, terencana untuk mencapai tujuannya. Tindakan pemerintah dapat berupa tindakan yang mempengaruhi masalah, atau tidak.

#### **2.1.3.4 Jenis-Jenis Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis menurut James Anderson yang dikutip oleh Suharno ( 2010), yaitu:

- 1) Kebijakan Substansif: kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
- 2) Kebijakan Prosedural: kebijakan mengenai bagaimana kebijakan substansif dapat dijalankan
- 3) Kebijakan Distributif: kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat.
- 4) Kebijakan Regulatori: kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
- 5) Kebijakan Redistributif: kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- 6) Kebijakan Material: kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.
- 7) Kebijakan Simbolis: kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 8) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau *Public Goods*: kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.
- 9) Kebijakan barang privat atau *Privat Goods*: kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Adapun menurut William N. Dunn sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007:32) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Masalah kebijakan (*policy public*) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui Tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi

yang mendahului adanya masalah maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

2. Alternative kebijakan (*policy alternative*) Yaitu arah Tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecah masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.
3. Tindakan kebijakan (*policy actions*) Adalah suatu Gerakan atau serangkaian Gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*) Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
5. Hasil guna kebijakan Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada masalah yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu masalah dapat menumbuhkan masalah sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Sedangkan menurut Nugroho (2006:31) memaparkan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.



Tiga kelompok kebijakan publik yang dibagi dapat kita pahami bahwa kebijakan memiliki sifat makro atau peraturan yang bersifat umum, kebijakan bersifat meso yang dimana kebijakan sifatnya memperjelas dan kebijakan bersifat mikro yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Mentri, Gubernur, bupati dan Wali Kota.

#### **2.1.3.5 Proses Kebijakan Publik**

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam Ayuningtyas (2014:30)

##### **a. Pembuatan Agenda**

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

a. Formulasi kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapantahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihanpilihan, penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

b. Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

c. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan: mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh

besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan

Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan dan lainnya yang bersifat memaksa. Kebijakan yang dapat dikatakan efektif yaitu jika dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dari masyarakat sehingga pemerintah agar memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif dilakukan dimulai dari merancang program secara teratur atau terstruktur dalam prosesnya.

#### **2.1.4 Implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Implementasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan atau peraturan. Implementasi pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle dalam Mulyadi (2015:47) mengatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sutojo (2015:3), implementasi adalah memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usah-usaha untuk mengadministrasikan ataupun menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan menurut Wahyu dalam Mulyadi (2015:50) mengemukakan bahwa :

“implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi yaitu kegiatan pelaksanaan atau suatu proses yang berkaitan dengan suatu kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh sebuah organisasi atau instansi, untuk penetapan suatu kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan agar tujuannya tercapai.

### **2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Matland dalam Hamdi (2014:98) “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*).”

Sedangkan menurut Mulyadi (2015:26) “implementasi kebijakan adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, yang dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.”

Menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47)

“tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Naditya, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan merupakan langkah terakhir dan terpenting dalam struktur kebijakan publik. Implementasi menentukan bahwa kebijakan yang

dikembangkan oleh pemerintah benar-benar diterapkan dan bahwa tujuan berhasil dicapai seperti yang direncanakan. Implementasi itu sendiri merupakan upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **2.1.4.1 Model-model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik memiliki model yang menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Model-model implementasi kebijakan secara teori adalah sebagai berikut

Model van Meter dan van Horn dalam Hamdi (2014:99) mencakup enam komponen sebagai berikut:

1. Suatu lingkungan yang secara bersama-sama menstimulir pejabat pemerintah dan menerima produk dari pekerjaan mereka
2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.
3. Suatu proseskonversi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pemerintah yang mentransformasikan tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik
4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat pemerintah.
5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien.
6. Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan Kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya.

Model Van Meter dan Van Horn terdiri atas enam variable yang membentuk kaitan antara kebijakan sebagai berikut

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi
4. Karakteristik pelaksana
5. Kondisi ekonomi, politik dan sosial
6. Disposisi pelaksana

Smith dalam Satibi, (2019) mengajukan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan istilah "*A Model of The Policy Implementation Process.*" Model ini dipandang sebagai model implementasi kebijakan yang paling klasik, yang di dalamnya terkait empat variabel. keempat variabel tersebut antara lain; (1) kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan, (2) kelompok sasaran (*target group*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan, (3) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, (4) *environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Model Merilee S. Grindle dalam Tahir, (2014:74) implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci. Isi kebijakan menurut tersebut yaitu:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik Lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan seras daya tanggap pelaksana

Model Charles O. Jones dalam Tahir (2014:81) bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas yang dimaksud yaitu:

1. Organisasi pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan
2. Interpretasi menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi (penerapan), berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.charles



Menurut Warwic dalam Tahir (2014:93) dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kemampuan organisasi
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

### **2.1.5 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Taufiq (2015) dalam jurnalnya mengemukakan Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Cimahi (RTRW), sebagaimana yang dimaksud dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

#### **2.1.5.1 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional**

Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara

yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat diantaranya:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional.
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
6. Penataan ruang kawasan strategis nasional
7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota.
8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
9. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang wilayah nasional meliputi, akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air.

Pola ruang wilayah nasional memiliki tiga bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal, di antaranya:
2. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
3. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.
5. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.5.2 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi**

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan.
3. Penetapan kawasan strategis provinsi Arahana pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

4. Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:

1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah.
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

#### **2.1.5.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota**

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota..
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
3. Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
6. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas untuk memudahkan pemecahan masalah pada penelitian ini memerlukan berbagai teori-teori sebagai tolak ukur dari suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi ataupun telaah kepustakaan. Maka dari itu peneliti mengajukan landasan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Naditya, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

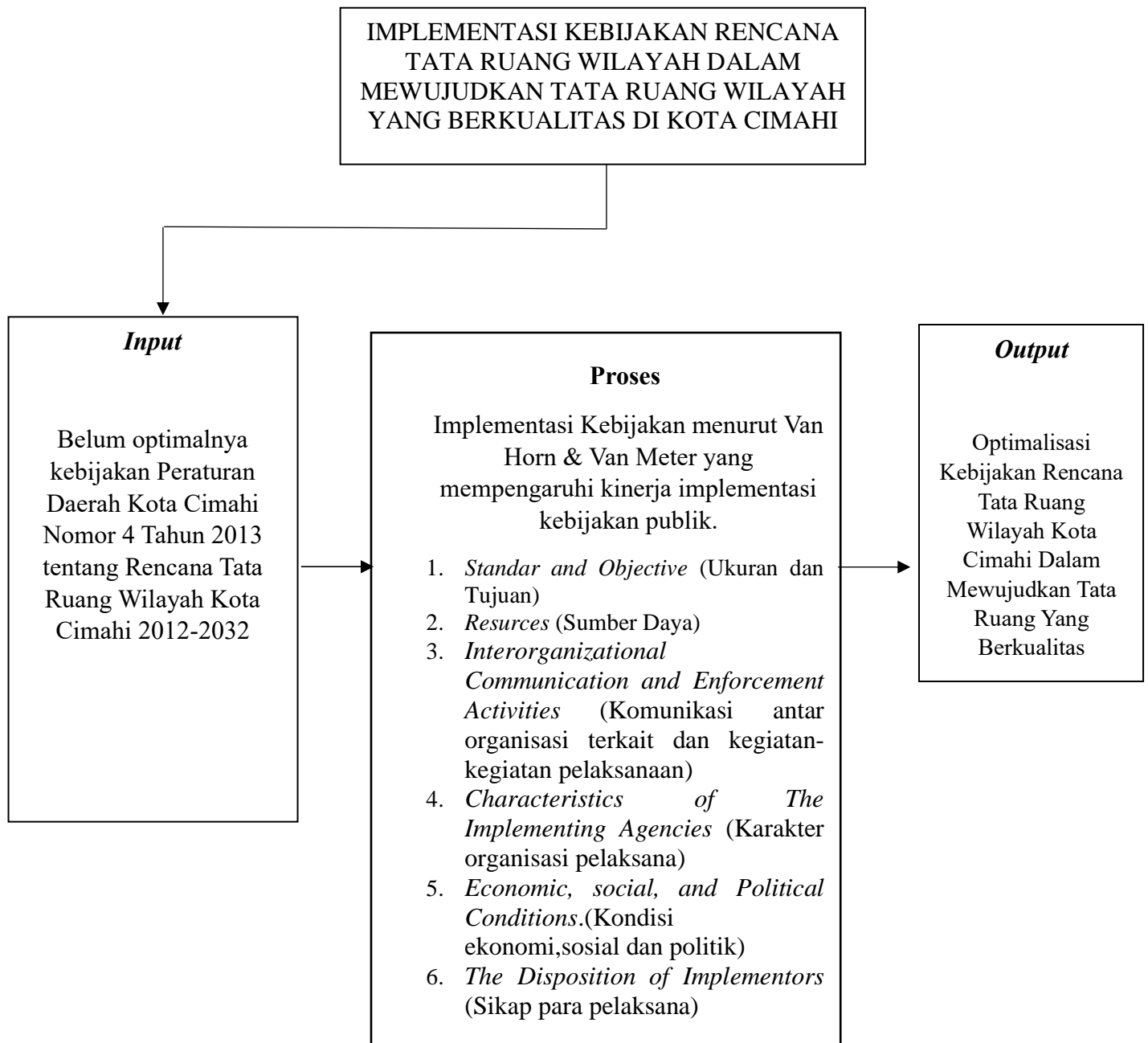
“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Selanjutnya terkait indikator-indikator dari implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2005) menyebutkan ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a) Standar dan sasaran kebijakan Agar tidak terjadi timbulnya konflik di antara para agen implementasi, standart dan sasaran kebijakan harus terukur dan jelas
- b) Sumber Daya Sumber daya manusia maupun non manusia sangat diperlukan sebagai pendukung kebijakan
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam implementasi sebuah program sangat diperlukan koordinasi dengan instansi lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan
- d) Karakteristik agen pelaksana Bagaimana kelompok berkepentingan mendukung implementasi kebijakan, termasuk karakteristik partisipan yakni mendukung atau menolak, sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi

kebijakan

- e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kondisi sosial, ekonomi , dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung jalannya implementasi kebijakan
- f) Disposisi implementor Terdapat tiga hal penting yang terdapat dalam disposisi implementor, yaitu :
  1. Respon implementor terhadap kebijakan dan akan mempengaruhi keinginannya untuk melaksanakan kebijakan
  2. Pemahaman terhadap kebijakan
  3. Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



### 2.3 Proposisi

Rahayu (2007: 39) menyatakan proposisi adalah kalimat yang mengandung pernyataan tentang hubungan fakta-fakta yang dapat dinilai benar dan salah. Fakta-fakta yang digunakan harus dapat menunjang kebenaran dari sebuah proposisi.

1. Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi ditentukan oleh Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.
2. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi